

BAB VI PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta dengan Pemerintah Kota Hanoi didasari sikap saling menghargai, membangun, dan mengembangkan kontribusi aktor pada tingkat sub-nasional dalam ruang lingkup hubungan internasional. Kerja sama yang terbentuk didasari pada pencapaian kepentingan nasional masing-masing negara yang memiliki andil besar dalam isu-isu global, khususnya sektor pariwisata. Kerja sama yang dijalin antara Kota Jakarta memiliki fokus kerja sama sektor pariwisata dimana adanya perencanaan revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta. Kerja sama ini berbentuk kolaborasi antar kota yang berbeda negara atau yang biasa dikenal dengan istilah *sister city*, dimana terlihat bahwa unsur diplomasi yang terjalin dalam hubungan antar negara tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sebagai aktor utama dalam sebuah struktur negara namun juga oleh Pemerintah Daerah.

Kerja sama *sister city* yang terjalin antara Kota Jakarta dan Kota Hanoi memiliki maksud dan tujuan untuk mempererat hubungan diplomatik yang terjalin diantara kedua belah pihak, serta sebagai salah satu upaya meningkatkan hubungan bilateral yang dijalin oleh Indonesia dan Vietnam. Sejak penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) pada tanggal 23 November 2003 hingga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) berupa *Cooperative and Friendship City* antara Kota Jakarta dan Kota Hanoi pada 23 November 2004, bidang-bidang yang dikerjasamakan telah ditetapkan dan ditentukan untuk dijadikan sebagai acuan dasar atau intensif fokus bagi kedua kota. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sebagai inisiator kerja sama, menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pusat dalam kerja sama ini sangat baik.

Kerja sama yang berfokus dalam proses pengorganisasian dan revalitasisasi bangunan bersejarah dan bangunan terlantar, kawasan kota tua, kota

hijau, bangunan hijau, dan pembangunan kembali jalanan perkotaan ini melalui sejumlah program yang dilaksanakan oleh Kota Jakarta dan Kota Hanoi. Pelaksanaan kerja sama ini dimulai dengan program pertukaran kunjungan delegasi tim teknis guna bertukar informasi terkait pembangunan dan tata kelola kota. Kunjungan ini berlangsung pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Hanoi dan pada tahun 2018 oleh Tim Teknis Jakarta.

Namun setelah pelaksanaan pertukaran kunjungan delegasi tim teknis oleh kedua kota tidak memperlihatkan wujud konkrit. Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kerja sama yang terjalin antara kedua belah pihak menunjukkan indikator ketidak berhasilan program kerja sama *sister city* dalam revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta. Hal ini ditunjukkan dengan tidak berjalannya program kerja sama sesuai dengan rencana awal. Setelah penandatanganan *Implementing Agreement* dan pembuatan Program Arrangement, nyatanya Pemerintah Kota Hanoi tidak berkontribusi aktif dalam pelaksanaan program. Bahkan setelah dilaksanakannya program pertukaran tim teknis antara Kota Jakarta dan Kota Hanoi tidak ada keberlanjutan program yang dibuat antara kedua belah pihak dalam upaya revitalisasi Kawasan Kota Tua. Kurangnya komitmen Pemerintah Hanoi dalam menjalin kerja sama *sister city* dengan Jakarta juga ditunjukkan dengan ketidak ikut sertaannya Kota Hanoi dalam *Jakarta International Youth Program 2017*. Terlebih lagi adanya kendala internal yang dialami oleh Pemerintah DKI Jakarta semakin menghambat proses revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta. Kendala-kendala yang dialami oleh Pemerintah Jakarta disebabkan karena kurang berperan aktifnya pihak swasta atau perorangan yang memiliki gedung penyangga di sekitar Kawasan Kota Tua, hal tersebut membuat Pemerintah Kota Jakarta tidak dapat melakukan renovasi dan pemanfaatan kembali gedung-gedung penyangga di sekitar Kawasan Kota Tua Jakarta.

Tak ingin revitalisasi Kawasan Kota Tua terhambat, Pemerintah DKI Jakarta pun melakukan beberapa upaya guna mengatasi permasalahan dan kendala yang berlangsung. Mulai dari pelaksanaan kunjungan hingga penerapan konsep dan sistem tata kelola cagar budaya yang dimiliki Hanoi, melakukan pertemuan

dengan sejumlah BUMN dan pihak swasta dan/atau perorangan pemilik bangunan disekitar Kawasan Kota Tua, hingga pada proses negosiasi langsung dengan para pegiat seni dan ekonomi disekitar kawasan. Meskipun berlangsung lama dan melalui proses panjang, usaha Pemerintah Jakarta patut untuk diapresiasi. Dengan hal ini, maka rumusan masalah dalam karya tulis ini sudah terjawab dan diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembacanya.

Periode kerja sama *sister city* antara Kota Jakarta dan Kota Hanoi dalam revitalisasi Kawasan Kota Tua tahun 2017-2019 telah usai, namun revitalisasi bangunan bersejarah masih harus terus dilakukan. Jakarta perlu melakukan upaya lainnya untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan kawasan wisata bersejarah Kota Tua. Dapat disimpulkan, kerja sama *sister city* antara kedua belah pihak tidak berjalan. Terlihat dengan proses dan progres kerja yang berjalan stagnan. Meski begitu konsep paradiplomasi di Indonesia terlihat sudah dijalankan dengan adanya beberapa kerja sama dalam bentuk *sister city*.

VI.2 Saran

Kerja sama internasional dalam bentuk kota kembar atau *sister city* merupakan sebuah upaya penting bagi suatu kota disatu negara untuk mengembangkan sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi dan juga berkontribusi aktif bagi negara dan secara global. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia harus lebih gencar untuk melakukan promosi dan pembentukan kerja sama *sister city* khususnya terhadap Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia, tidak hanya ditujukan kepada Ibukota Provinsi atau kota-kota besar saja. Pemerintah Pusat sebagai penanggungjawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah harus lebih berusaha untuk membuat Pemerintah Daerah terlebih organisasi dan masyarakat tertarik untuk mencoba membentuk kerja sama dengan kota di negara lain guna memberikan kontribusi aktifnya terhadap pembangunan daerah dan negara.

Penulis menyadari bahwa masing-masing Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia harus lebih sering melakukan interaksi terkait keterlibatan daerah di Indonesia pada kancah Internasional. Selain itu, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat harus dapat membuat suatu program promosi yang disertai dengan sosialisasi yang dapat mengedukasi bagi organisasi, pihak swasta, maupun masyarakat mengenai seberapa pentingnya untuk menjalin hubungan kerja sama internasional. Hal ini akan membantu pihak-pihak diluar pemerintahan untuk mengerti akan guna kerja sama internasional apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan sektor pariwisata dan ekonomi yang dapat berpengaruh bagi segala kalangan.

Secara tidak langsung penelitian ini juga menggambarkan contoh kasus untuk studi akademik mengenai bagaimana jaringan kerja sama *sister city* yang aktif dan pelaksanaannya tidak hanya melibatkan pemerintah kedua kota, melainkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kedutaan Besar negara tempat kota mitra terletak dan juga pihak swasta. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam hubungan internasional, negara hanya berperan sebagai perwakilan saja. Dimana aktor-aktor lain lah yang sebenarnya memiliki peran penting dalam pelaksanaan kerja sama, baik itu kerja sama kota ataupun kerja sama bilateral. Aktor yang berperan tidak hanya Pemerintah Pusat melainkan Pemerintah Daerah dan organisasi-organisasi non-pemerintah. Namun guna mempercepat dan mensukseskan kerja sama, peranan Pemerintah Daerah lah yang dinilai lebih penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah dapat lebih cepat dan tanggap dalam menyentuh persoalan yang terjadi dimasyarakat yang ada di suatu negara. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah jugalah yang dapat bergerak lebih efektif dan efisien guna mendorong masyarakat yang ada di suatu negara untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan di negara tersebut.

Melalui penelitian ini, Pemerintah DKI Jakarta diharapkan lebih memperhatikan kembali terkait program kerja sama yang dijalin dengan negara mitra dalam meningkatkan pembangunan Kota Jakarta. Hal ini bertujuan agar kerja sama *sister city* diantara kedua kota kedepannya mampu memberikan timbal balik yang setara antara keduanya dengan tidak ada harapan-harapan dari program

kerja sama yang telah disepakati dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang meleset dari perkiraan. Agar kedepannya tidak akan mempengaruhi hubungan diplomatik antara Kota Jakarta dengan kota mitra atau bahkan hubungan Indonesia dengan negara asal kota yang dijadikan mitra dalam *framework* kerja sama *sister city*.